

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN EKONOMI KESEJAHTERAAN UMMAT

Andi Bahri S.

Dosen STAIN Pare-Pare

E-mail: laulaka@gmail.com

Abstract

The obligation of zakat in Islam has a fundamental significance, other than closely related to aspects of divinity, is also closely related to the economic and social problems. Zakat became one of the instruments of collective social welfare achievement. But in reality, the economic potential of this promising and well-being not optimally managed, professional and accountable.

This article offers an analysis of the charity as an instrument of economic development of the welfare of the Ummah with the first show reviews historicity zakat. Zakat as an instrument ekonommi and welfare of the community, efforts to optimize its management becomes a necessity because it is one of the pillars of Islam dimension ubudiyyah, ijtima'iyyah and iqtishadiyyah, which can contribute to enhancing the welfare of society and the stranding-rope of love between man (hablunminannas) as well as liaison komunikasi a servant to his Lord (hablunminallah).

Keywords: *Zakat, economic prosperity, and welfare of the people.*

A. Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu pilar Islam yang menjelaskan tentang kewajiban khusus dalam mengeluarkan sebagian kekayaan individu untuk kebaikan sosial. Banyak literatur yang mengkaji zakat dari berbagai aspek, baik dari aspek hukum (*fiqh*), manajemen, potensi maupun peranannya dalam pengentasan kemiskinan. Kalangan ekonom dan peminat kajian pembangunan modern juga telah banyak melakukan kajian-kajian serupa. Hal ini menunjukkan sedemikian masivnya kajian dan tulisan tentang zakat yang berusaha membuktikan betapa pentingnya peranan yang dimainkan zakat sebagai

sebuah instrument bagi pembangunan ekonomi.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Terkait dengan aspek ketuhanan (*hablunminallah*) banyak ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan (Nuruddin, 2006: 1). Bahkan Rasulullah menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam (HR. Sahih Bukhari). Sedangkan terkait dengan aspek sosial (*hablunminnaas*), perintah

zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, sehingga zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada level individu yang akan terakumulasi pada level masyarakat (Nuruddin, 2006: 2). Tentunya hal tersebut menjadi ideal jika dapat terwujud pada negeri yang diibaratkan dalam Al-Quran (بلدة طيبة) (akankah harapan negeri ideal itu adalah Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim disertai sumber daya alam yang melimpah?

Sebagai negeri yang berpenduduk masyarakat Muslim terbesar di dunia, potensi menjadi negeri yang surplus di bidang zakat tentunya diatas kertas hal tersebut dapat dikalkulasi secara matematis yang menggambarkan kepada halayak akan potensi-potensi ekonomi dan kesejahteraan yang menjanjikan, jika hal tersebut dikelola secara optimal, professional dan akuntabel.

Beberapa dekade belakangan ini di Indonesia telah terbentuk badan-badan dan lembaga-lembaga amal zakat (BAZ/LAZ), pada pundak badan dan lembaga-lembaga tersebut harapan itu semestinya disandarkan, namun dari beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat di negeri ini, baik dari hulu hingga hilir.

Sebagai bahan diskusi (*academic crisis*) tentang upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat tersebut, berikut penulis menyuguhkan beberapa problematika studi dalam tulisan ini,

yaitu: (1) Bagaimana kedudukan zakat sebagai salah satu pilar Islam dan apa yang menjadi problem dalam pengelolaan zakat selama ini? (2) Bagaimana kedudukan zakat profesi dalam Islam? (3) Bagaimana zakat dan pajak dalam Islam?

B. Pengertian Zakat

Secara etimologis Zakat (زَكَاةٌ) merupakan bentuk kata jadian (*mashdar*) dari kata *zaka* (زَكَى - يَزْكُو) yang berarti *namaa* (نَمَى: tumbuh berkembang). Menurut Muhammad bin Ismail al-Kahlani, zakat berarti مُشْتَرَكَةٌ (Perpaduan antara tumbuh dan suci) (al-Kahlani, tt: 173). Dan menurut Sayyid Sābiq, arti kata zakat ialah *tumbuh*, *suci* dan *berkah* (Sābiq, 2000: 5). Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian dengan urutan berikut: Zakat berarti (1) نَمَى (kesuburan), طَهَارَةٌ (kesucian), تَزْكِيَةٌ تَطْهِيرٌ (keberkahan) dan (2) تَزْكِيَةٌ تَطْهِيرٌ (mensucikan) (Shiddieqy, 1976: 20).

Secara terminologi Zakat, Hasbi Ash-shiddieqy mengutip pendapat al-Mawardi sebagai berikut (Shiddieqy, 1976: 21):

الزَّكَاةُ اسْمٌ لَا خَدَّ شَيْءٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لَطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ .

Zakat itu nama bagi pengambilan yang tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.

Harta yang dikeluarkan dinamai zakat karena; pertama, dari zakat yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala; kedua, zakat

merupakan suatu upaya mensucikan jiwa dari kekikiran dan dosa karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah dan membersihkan jiwa sekaligus memupuknya dengan berbagai kebaikan, dengan syarat-syarat sebagai berikut: merdeka, muslim, aqil balig dan tidak mempunyai tanggungan hutang yang mengurangi obyek zakat tersebut (Aly, 1435 H: 16).

Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (*batas minimal*) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Quran.

C. Sejarah Perkembangan Zakat

Dalam sejarah kejayaan Islam, ketika zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil kepada orang-orang yang berhak, zakat terbukti berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat, juga sebagai sumber dana potensial yang dapat menjadi instrument dalam pengentasan kemiskinan dan dapat mengurangi kesenjangan sosial. Sebagai contoh di masa pemerintahan Khulafaur-Rasyidin; Khalifah Umar bin Khathab, di negeri Yaman yang salah satu daerah kekuasaan Khalifah Umar.

Pada waktu itu, kesejahteraan umat tersebar merata, sampai-sampai secara ekonomi tidak ada warga yang berhak menerima zakat. Begitu pun pada masa setelahnya, pada masa daulah Bani Umayyah; Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam waktu singkat sekitar dua tahun (99-101 H), berhasil mensejahterakan masyarakat dengan dana zakat, infak dan sedekah, sehingga di Baitul Maal ketika itu dana zakat berlimpah karena sulit menemukan warga yang tergolong penerima (*mustahik*) zakat.

Perintah zakat secara syariah, dimulai pada periode Madinah, pada periode ini perhatian Rasulullah Saw. banyak mengarah pada persoalan sosial kemasyarakatan. Dengan mengacu pada landasan syariah yang di perintahkan Allah swt., sistem pengelolaan zakat senantiasa mengalami perkembangan, dengan perkembangan tersebut senantiasa mengarah pada pencapaian kejayaan perekonomian umat Islam pada masa-masa setelahnya.

Keberhasilan pengelolaan zakat pada masa Islam klasik tersebut, bila ditelusuri, merupakan sebuah proses yang terintegrasi dari penerapan syariah Islam di berbagai bidang; seperti hukum, politik, sosial budaya. Dalam penerapan nilai-nilai syariah tersebut, sistem pengelolaan zakat yang professional menemukan signifikansinya dalam pembangunan ekonomi umat. Berikut beberapa signifikansi zakat dalam membangun ekonomi masyarakat, sebagai berikut (Utomo, 2009: 17):

1. Zakat sebagai ibadah wajib dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariah, sebagaimana dalam QS. al-Taubah/9:60.

2. Zakat sebagai wadah mewujudkan keseimbangan antara pemilik harta yang berlebih dengan mereka yang membutuhkan.
3. Zakat sebagai pemberian yang akan membantu kehidupan ekonomi yang lemah (*dhu'afaa*) dan dapat menjadi lebih berdaya dengan program zakat produktif.
4. Zakat dapat digunakan sebagai sumber dana dalam pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan keamanan dan program-program pembangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan Negara.
5. Zakat dapat menumbuhkan kesadaran dan rasa kepedulian terhadap kemanusiaan, dengan kesadaran tersebut dapat membentuk rasa kepedulian sosial yang tinggi.
6. Zakat dapat digunakan untuk menjalankan program-program produktif yang dapat mengubah taraf ekonomi seseorang menjadi lebih baik.

Dari sekilas sejarah tersebut, dapat dipahami bahwa zakat sebagai ketetapan yang disyariahkan Allah Swt. mengandung banyak potensi kebaikan bagi umat manusia. Optimalisasi zakat bila dilakukan sungguh-sungguh dapat menghasilkan kondisi perekonomian umat yang baik. Kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, profesionalitas pengelolaannya, dan kapabilitas amil zakat adalah beberapa faktor penunjang yang berperan dalam penerapan zakat guna mewujudkan zakat sebagai instrumen ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

D. Landasan Kewajiban Zakat

1. Dalil Al-Quran

Dalam Al-Quran kata zakat terdapat 32 kata, dan 82 kali diulang

dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata *shadaqah* dan *infaq*. Dari 32 ayat dalam Al-Quran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hanya dalam 3 ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan shalat, yaitu pada surat Al-Kahfi (18): 81; Maryam (19):13 dan Al-Mu'minun (23): 4 yang merupakan ayat Makkiyah (Nuruddin, 2006: 24).

Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat erat kaitannya dengan shalat sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablunminallah*) dan hubungan antarmanusia (*hablunminannas*).

2. Dalil Hadis/Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun sekitar 800 hadis yang berkaitan dengan zakat, termasuk beberapa *atsar*. Hadis-hadis tersebut ada yang memberikan perintah umum tentang zakat dan ada pula hadis yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti penjelasan tentang jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul dan sasaran zakat.

Ketentuan zakat dalam hadis-hadis tersebut ditampilkan dalam *uslub targhib, tarhib* dan juga berisi tentang hikmah zakah dengan maksud memberikan dorongan kaum Muslim untuk mengeluarkan zakat secara sukarela (Nuruddin, 2006: 27).

3. Dalil Ijma`

Abu Bakar As-Shiddiq sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad Saw. Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, pada masa

kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Selanjutnya pada masa tabi'in dan imam mujtahid setelahnya melakukan ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu (Nuruddin, 2006: 27).

4. Landasan Historis

Secara historis, zakat telah disyariatkan kepada para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad Saw. sebagaimana telah disyariatkan kepada Ibarhim As. dan Ismail As. bahkan terhadap Bani Israil, umat Nabi Musa As. syariat zakat telah diterapkan.

Demikian pula terhadap umat Nabi Isa As. ketika Isa As masih dalam buaian. Ahli Kitab juga diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai salah satu instrument agama yang hanif (Nuruddin, 2006: 28).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ajaran yang universal karena diperintahkan kepada setiap umat pada setiap zaman dan merupakan salah satu risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Perbedaannya pada aspek teknis pelaksanaan perintah zakat.

E. Sifat Zakat

1. *Ijbari* (Hak Negara)

Negara melalui pemerintah diberi hak oleh Allah untuk

mengelola zakat. Pemerintah mempunyai tugas wajib untuk mengambil zakat dari rakyat yang telah memenuhi syarat, baik rela maupun tidak rela. Pemerintah dapat mengambil zakat, baik secara wajar maupun secara paksa (khususnya terhadap orang yang enggan membayarnya), meskipun pembayaran zakat itu dituntut untuk ditunaikan berdasarkan suatu tindakan sadar dan ikhlas, agar bernilai ibadah dan mendapatkan berkah serta ridha dari Allah Swt.

Menurut Hasbi, bahwa kepala Negara wajib membentuk badan amil sebagai naib untuk mengurus zakat, yakni mengumpulkan dan mendistribusikannya; dan jika ada individu wajib zakat enggan membayarnya, maka kepala negara boleh memungut zakat dengan paksaan (Shiddieqy, 1975: 60). Sebagaimana dalam Q. S. *al-Taubah* (9): 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hasbi menegaskan, bahwa ayat ini mewajibkan kepala negara memungut zakat dari rakyat dan mewajibkan rakyat memberi zakat kepada kepala negara (Shiddieqy, 1975: 585). Senada dengan Hasbi, Abdurrahman Qadir berpendapat bahwa ibadah zakat bukan sekadar amal kedermaawanan (*karitatif*), melainkan suatu kewajiban otoritatif (*ijbari*) (Qadir: 2001: 85-86).

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, keberadaan pemerintah (*ulil-amr*), teristimewa yang memperoleh mandat kekuasaan melalui musyawarah (*syura*), ia mendapat hak ketaatan dari seluruh rakyat. Seluruh rakyat menanggung kewajiban taat kepadanya. Allah berfirman dalam Q. S. *al-Nisa`* (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*al-Qur`an*) dan Rasul-Nya (*sunnah*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya.

“*ulil-al-amri*” dalam pandangan Muhammad Rasyid Ridha adalah kelompok yang mendapat kepercayaan untuk diikuti kebijakannya atas dasar memiliki

keahlian dalam mengambil keputusan dan memberi pertimbangan yang sehat demi kepentingan umat. Dengan keistimewaan yang dimiliki pemerintah sebagai *ulil-amri*, secara mudah dapat menerapkan ajaran zakat sebagaimana mestinya (Ridha, 1983: 462).

2. *Ijtihadi*

Zakat digolongkan sebagai *ijtihadi* (terbuka ruang padanya nalar *ijtihad*). Indikatornya terletak pada “*lafadz`amm*” dalam nas ayat, *amwal* (أَمْوَالٌ) yang diperintahkan Allah untuk diambil zakatnya yang kemudian disebut harta wajib zakat. dalam Ilmu Ushul Fiqhi bentuk *lafadz`amm* berlaku umum, yakni meliputi seluruh macam harta. Dalam perspektif lain, bahwa harta yang diciptakan Allah di permukaan bumi demikian banyak, bahkan tak terhitung jumlahnya. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi menciptakan jenis harta baru walau unsurnya dari harta benda ciptaan Allah. Dari waktu ke waktu manusia dengan potensinya dapat menciptakan harta baru dalam berbagai macam, maka jumlah harta akan makin bertambah dengan berbagai macam tak terbatas jumlahnya sepanjang zaman. Demikian pula cara memperoleh harta yang wajib dizakati seperti perternakan, perdagangan, pertanian, penambangan dan lain-lain, yang sangat berbeda dengan cara memperolehnya pada zaman Nabi saw. Pada era yang serba canggih saat ini, banyak cara memperoleh harta jauh lebih mudah

dibanding dengan cara memperoleh harta yang menjadi kelompok wajib zakat pada zaman Nabi saw.

Terkait dengan hal tersebut, Hasbi dalam kitabnya, *Pedoman Zakat* menegaskan, bahwa banyak hal-hal dalam ajaran zakat yang menjadi faktor penggerak bagi para ulama untuk berijtihad atasnya. Demikian pula Yusuf Qardhawi dalam kitabnya, *Dawr al-Zakah fiy 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah* (*Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*; Edisi Indonesia: 93-103) membahas tema khusus : *Perluasan Koridor Zakat - Berbagai Keraguan dan Hambatan*. Abdullah Nashih Ulwan dalam kitabnya, *Ahkam al-Zakah 'ala dhawi' al-Madzahib al-Arba'ah* (*Hukum Zakat*; Edisi Indonesia: 93-106) membahas tema khusus: *Berbagai Masalah yang Berkaitan dengan Zakat - dengan membahas sepuluh aspek dari ajaran zakat dengan pembahasan yang bersifat ijtihadiyyih atau bernuansa pemikiran-pemikiran baru*.

Muhammad Ali al-Sayis dengan berpatokan pada hal-hal berikut: 1) bahwa perubahan hukum syariat dapat terjadi karena perubahan 'illat, 2) tujuan pembuatan syariat untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan, 3) pendapat dan kebijakan Umar bin Khatthab yang tidak memberikan zakat kepada *muallaf* sebagai kelompok yang berhak menerima zakat. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Ali Hasan yang menyatakan apresiasi seluas-luasnya terhadap upaya *ijtihad* dalam masalah zakat sepanjang mengandung kemaslahatan umum sebagai 'illat

syariat (Hasan, 2003: 81). Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ajaran zakat mulai tataran yang paling fundamental (*kecuali kedudukan hukumnya yang wajib*), dapat diadakan *ijtihad* untuk melahirkan temuan baru sepanjang ada pertimbangan kemaslahatan hakiki (Hamang, 2013: 91).

3. *Fawri*

Abdullah Nashih Ulwan mengisyaratkan, sifat perintah pembayaran zakat yang bersifat *fawri* (segera), yaitu perintah pelaksanaan pembayaran zakat sesegera mungkin bila syarat-syaratnya telah terpenuhi (Ulwan, 1988: 93). Menurut Nashih Ulwan, jika harta kepemilikan telah memenuhi syarat-syarat, maka wajib segera dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini tidak boleh terjadi keterlambatan pembayaran zakat atasnya. Hasbi mengemukakan, zakat wajib segera dibayar atas harta kepemilikan yang telah memenuhi syarat serta memungkinkan untuk dibayar. Pemahaman ini didasarkan pada ayat-ayat berikut:

Q. S. al- Munafiqun (63): 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Dan nafkahkanlah sebagian
rezeki yang telah Kami
karuniakan kepadamu sebelum
datang kematian kepada

seseorang di antara kamu lalu dia berkata: Wahai Tuhanku, mengapakah Engkau tidak tangguhkan sejenakpun, lalu aku memberikan sedekah dan aku berusaha menjadi orang-orang yang saleh.

Hasbi, mengatakan bedasar pada Q.S. *al-Munafiqun* (63):10 tersebut menegaskan suatu perintah berupa wajib menunaikan sedekah, wajib menunaikan haji dan wajib menunaikan segala hak harta lainnya, dengan segera. Mengingat zakat merupakan salah satu hak harta, sudah barang tentu zakat tergolong bagian dari perintah pelaksanaan hak harta secara segera setelah terpenuhi syaratnya (Shiddieqy, 1975: 58).

Imam al-Syaukani dalam kitabnya, *Nailul-Authar*-sebagaimana dikutip Abdullah Nashih Ulwan menegaskan: Sesungguhnya kebajikan itu sudah selayaknya untuk disegerakan pelaksanaannya, mengingat melapetaka selalu mengancam, hambatan-hambatan selalu mengganggu, kematian entah kapan datangnya dan memungkinkan tiba-tiba. Karena itu menangguh-nangguhkan adalah sifat yang tak terpuji dan bersegera adalah lebih baik, demi membebaskan diri dari tanggungan. Bersegera berarti ia lebih cepat dalam menutupi kebutuhan dan lebih menjauhkan diri dari sifat menangguh-nangguhkan yang tercela itu serta lebih mendekati kepada keridhaan Allah sekaligus lebih menghapuskan dosa. Lebih cepat lebih baik, karena lebih cepat dapat memberdayakan

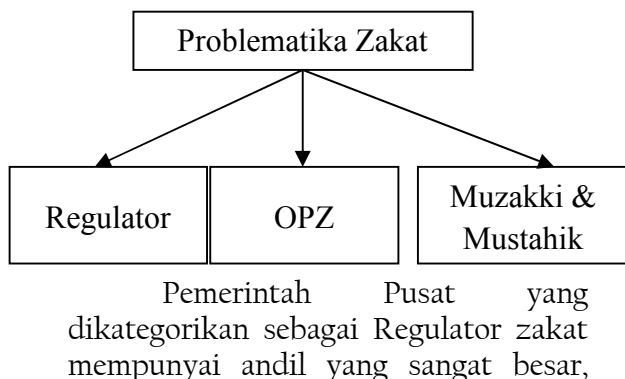
kaum *dhuafa* dan lebih cepat mendapatkan kehormatan serta lebih cepat memperoleh pahala dan sumber keberkahan hidup (Ulwan, 1988: 94).

F. Problematika dalam Pengelolaan Zakat

Di balik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan diantaranya; kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM (Sumber Daya Manusia) amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antar BAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan masalah efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat.

Nurul Huda dkk dalam bukunya “*Zakat perseptif mikro-makro (Pendekatan Riset)*” menguraikan bahwa problematika zakat dapat klasifikasi menjadi tiga jenis berdasarkan sumber kelembagaannya: regulator, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan masyarakat sebagai *muzakki* dan *mustahiq* (Huda, 2015: 43).

Jika dipetakan problematika pengelolaan zakat secara nasional adalah sebagai berikut:



namun selama ini dianggap sebagai lembaga yang paling bermasalah dalam pengelolaan zakat nasional karena peran-peran yang semestinya dilakukan oleh regulator tidak dijalankan dengan baik dan optimal. Seperti pembuatan sistem jaringan dan standarisasi pengelolaan zakat secara nasional serta mengefektifkan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah selaku regulator pengelolaan zakat. Memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka implementasi undang-undang dan peraturan teknis yang dikeluarkan tentang pengelolaan zakat di tingkat pusat.

Selain itu pemerintah sebagai regulator zakat, mempunyai kewajiban dalam merealisasikan anggaran untuk operasional pengelolaan zakat bagi Badan Amil Zakat melalui APBN; mengakomodir usulan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan substansi amandemen UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, termasuk diantaranya usulan dan aspirasi yang menginginkan zakat diakui sebagai pengurang pajak yang dituangkan dalam peraturan perpajakan (Huda, 2015: 43).

Zakat yang hanya diposisikan sebagai kewajiban sukarela oleh Negara (*voluntary system*) memiliki dampak buruk bagi pengelolaan zakat nasional, hal ini berdampak buruk terhadap kesadaran berzakat masyarakat (*muzakki*), demikian pula pengetahuan fikih zakat tidak cukup untuk mengajak masyarakat menunaikan zakat karena tidak ada sanksi (*punishment*) yang diterima bila tidak bayar zakat, dan tidak pula ada insentif (*reward*) yang didapat bila bayar zakat.

Problematisa lain yang muncul dari beberapa penelitian tentang zakat adalah intensitas koordinasi antara regulator dan organisasi pengelola zakat (OPZ) yang masih rendah, salah satu kelemahan regulator pengelolaan zakat dalam hal ini Kementerian Agama adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap OPZ, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penataan dan akreditasi pengelolaan zakat, kementerian agama terkesan lepas tanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada BAZNAS Pusat. Mengingat BAZNAS Pusat seharusnya berperan hanya sebagai regulator pengelolaan zakat nasional yang terhindar dari konflik kepentingan (*conflict of interest*), namun kenyataannya selain berperan sebagai regulator, saat ini BAZNAS Pusat juga berperan sebagai operator yang menjalankan fungsi pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. namun disayangkan hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya amil yang profesional, dikarenakan belum adanya sistem pengembangan sumber daya manusia yang dapat memasok kebutuhan sumber daya amil bagi OPZ. Di saat yang sama, tenaga amil hingga saat ini diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan amil profesional. Kebanyakan mereka berasal dari latar belakang yang tidak ada hubungannya dengan profesi amil. Hal ini membuat lemahnya etos kerja, kreatifitas dan profesionalisme dalam OPZ.

Selain keterbatasan SDM tersebut yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan zakat adalah sinergitas antar-OPZ, kurangnya sinergi antarpengelola zakat sangat tampak pada kurangnya kerja sama antara BAZ (Badan Amil Zakat) dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Penyebabnya adalah egoisme yang muncul pada kedua pihak pengelola zakat tersebut. di satu sisi BAZ merasa bahwa institusinyalah yang paling berhak dalam mengelola zakat dan di sisi lain sebagian LAZ menganggap bahwa regulasi zakat yang baru, yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Huda, 2015: 50).

Probelmatika berikutnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fikih zakat. Sebagian masyarakat memandang bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, sebagian lain masih menganggap bahwa zakat hanya dikeluarkan di bulan Ramadhan, zakat juga masih dipahami hanya sebagai ibadah ritual, yang pada sesungguhnya zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial. Fenomena membayar zakat secara langsung kepada mustahik telah menjadi tradisi pada sebagian besar masyarakat di Indonesia. Muzakki lebih senang menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahik dalam bentuk bantuan-bantuan sosial (Huda, 2015: 50).

Menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik hukumnya sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad saw. Karena Allah swt telah menjadikan profesi amil sebagai pengelola zakat dan dibagikan dalam al-Quran QS. At-Taubah (9): 60;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), mereka adalah: 1). Orang Fakir, yaitu; orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2). Orang Miskin, yaitu; orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3). Pengurus zakat, yaitu; orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4). Muallaf, yaitu; orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5). Memerdekakan Budak, dan mencakup juga membebaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6). Orang Berhutang, yaitu; orang yang berhutang karena untuk

kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dapat dibayarkan hutangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7). Fii Sabilillah, yaitu; untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ahli tafisr ada yang berpendapat bahwa *fii sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8). Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (Utomo, 2009: 43-46).

Salah satu golongan yang berhak menerima zakat yaitu pengurus-pengurus zakat (*amilin*). Jika zakat disalurkan langsung dari muzaki kepada mustahiq, maka seharusnya profesi amil tidak perlu ada. Amil tidak akan memiliki peran apa-apa jika semua muzakki membayar zakat secara langsung kepada mustahiq. Diangkatnya profesi amil secara langsung oleh Allah swt. Merupakan sebuah isyarat (*mafhum muwafaqah*) bahwa zakat seharusnya dikelola oleh amil supaya zakat dapat lebih berdayaguna untuk menciptakan perubahan sosial ekonomi masyarakat (Utomo, 2009: 46).

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan tentang optimalisasi zakat sebagai berikut (Utomo, 2009: 26):

1. Membangun kesadaran berzakat bagi umat Islam. Masih adanya orang Muslim yang tidak mengeluarkan zakat yang secara syariah mereka sudah memenuhi kriteria wajib zakat, hal ini mengindikasikan belum terbangunnya kesadaran

tentang zakat dengan baik di masyarakat.

2. Profesionalisme organisasi pengelola zakat (OPZ). Meningkatkan profesionalisme organisasi pengelola zakat tentu saja akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Berdasar pada hal-hal tersebut, tentunya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat maka solusi-solusi terhadap permasalahan tersebut yang harus di segerakan.

G. Kedudukan Zakat Profesi dalam Islam

Keterampilan manusia modern saat ini dapat dilihat dengan berbagai skill yang dapat menjadi sumber penghasilan, yang bila dikaitkan dengan sumber penghasilan yang digolongkan sebagai subyek zakat seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih klasik cenderung banyak yang tidak ditemukan persamaannya.

Menyikapi hal tersebut Yusuf Qardhawi mengklasifikasikan pekerjaan yang menghasilkan uang dua macam, yaitu (Qardhawi, 2007: 459):

1. *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa ada ketergantungan pada orang lain, berkat kecekatan tangan (*life skill*) ataupun akal pikiran. Penghasilan yang diperoleh dengan cara tersebut merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain.
2. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk orang lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang dikerjakan dengan tangan atau otak atau kedua-duannya. Penghasilan seperti ini

berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Dalam kaitannya dengan zakat, pekerjaan (*jasa, baik profesi maupun non-profesi*) telah menjadi perhatian kajian ulama dan cendekiawan kontemporer. Dalam kajian mereka menurut Qardhawi menekankan sebuah pendapat, bahwa penghasilan melalui jasa tergolong sebagai obyek wajib zakat (Qardhawi, 2007: 460).

Abd. al-Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abd. al-Wahab Khallaf dalam ceramah mereka tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952, yang salah satu poin penting di dalam uraiannya adalah *masalah jasa*, menegaskan seperti berikut (Hamang: 113):

Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisab. Jika kita berpegang pada pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai di tengah-tengah; kita dapat berpandangan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun, bahkan kebanyakan mencapai sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapat 'illat (penyebab) yang menurut ulama-ulama fiqh, sah dengan nisab yang merupakan landasan wajib zakat.

Hal ini didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah/2: 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا

كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ

الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا

فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Menurut ketiga ulama tersebut, termasuk beberapa ulama dan cendekiawan muslim kontemporer yang sependapat dengan mereka, bahwa kalimat "*min thayyibati ma kasabtum* (مَّا كَسَبْتُمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ): sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik) adalah berbentuk lafazh umum ('amm), sehingga memaknakan setiap penghasilan dari setiap usaha jasa. Apa pun sifat usaha dalam bentuk jasa tersebut, bersifat profesi atau non-profesi, penghasilan atau pendapatan yang didatangkannya tergolong obyek wajib zakat.

Dengan demikian, penghasilan dari usaha jasa, seperti dokter, akuntan, konsultan, pengacara, pejabat, dosen, atlet, pelatih olah raga, selibriti dan lain-lain, yang biasa disebut usaha jasa profesi; dan dari usaha jasa seperti makelar, tukang, petani dan lain-lain,

yang biasa disebut usaha jasa non-profesi, pada dasarnya semuanya tergolong penghasilan obyek zakat. Mokhtar Stork dan Muhammad Iqbal mengatakan, gaji dan penghasilan tidak teratur dari perdagangan (*seperti bisnis perbengkelan*) dikenakan zakat yang jumlahnya sama dengan usaha komersial lainnya (Iqbal, 2002: 471).

Dengan demikian pula, tidak tepat apabila diopsikan adanya pekerjaan profesi dan pekerjaan non profesi, yang menyebabkan adanya istilah zakat profesi yang khusus menggolongkan pekerjaan-pekerjaan seperti dokter, akuntan, konsultan, dosen, pengacara dan lain-lain sebagai obyek zakat dan tidak menggolongkan pekerjaan-pekerjaan seperti makelar, tukang, dan lain-lainnya sebagai obyek wajib zakat. Dalam hal ini, yang tepat ialah menggunakan istilah “*zakat pendapatan (kasab)*”, yang tercakup di dalamnya, baik yang penghasilan dari pekerjaan yang bersifat profesi maupun penghasilan dari pekerjaan non-profesi. Dengan kata lain, semua bentuk pendapatan dari setiap pekerjaan, apapun sifat pekerjaan itu adalah menjadi obyek zakat dengan zakat yang dipungut dari padanya disebut zakat pendapatan (*kasab*) (Hamang: 144).

Ketentuan-ketentuan zakat dikembangkan ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dari Mesir, Muhammad Abdul Mannan dari Pakistan, Tim Penyusun Ensiklopedi Islam Indonesia dan lain-lainnya mengembangkan konsep zakat dengan tidak terpaku berpedoman pada ayat-ayat dan hadis-hadis beredaksi atau berlafadz zakat, tetapi berani berpijak pada ayat-ayat berlafadz makna umum, namun menurut mereka memiliki substansi yang sama dengan

substansi zakat, misalnya Q.S. *al-Baqarah* (2): 267 yang ber-lafazh infak, yaitu *anfiq* (أنفقوا) bukan zakat), lalu dimaknai zakat seperti hasil dari usaha profesi modern yang berpenghasilan besar seperti dokter, pengacara, konsultan dan hasil dari usaha investasi modern seperti sewa gedung, pabrik, taksi, bus dan sebagainya tergolong harta-harta kekayaan wajib zakat; dengan kadar nisab dan batas haul masing-masing (<http://www.islamcendekia.com>). Dari pemikiran mereka inilah ditetapkan adanya zakat profesi dan zakat investasi.

H. Antara Zakat dan Pajak

Berbagai pendapat berkembang di masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak, dari berbagai pendapat tersebut, ada yang mempersamakan secara mutlak begitupula ada yang membedakannya secara mutlak, dan ada pula yang melihat bahwa satu sisi terdapat persamaan antara keduanya, sedangkan disisi lain, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya.

Seperti Yusuf Qadhwawi, yang banyak menjadi rujukan di Indonesia, menganggap bahwa zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan, bahkan membolehkan adanya pajak di samping kewajiban zakat (Ali: 11). Selain Yusuf, ada Muhammad Muhammad (2000) yang membagi secara sistematis *bait mal* terdiri dari penerimaan *fay*, *jizyah*, *kharaj*, *khumus*, *rikaz*, *anfal*, *ghanimah* sebagai pendapat dari milik umum, sedangkan pendapat dari milik Negara adalah *usyur*, zakat sebagai pendapatan yang bersifat utama, dan *dharibah* sebagai

pendapatan temporal. Demikian pula upaya pengintegrasian zakat dan pajak yang komprehensif dilakukan oleh Masdar Farid Mas'udi (1991) dalam bukunya "Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam", dan beberapa kajian terhadap pajak dan zakat lain yang cukup banyak kalau diuraikan secara rinci pada pembahasan ini.

Dari beberapa pemikiran tentang zakat dan pajak, dapat dikemukakan beberapa persamaan antara zakat dan pajak sebagai penerimaan fiskal Negara, bahwa kedua-duanya sama-sama dipungut dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dan kedua-duanya digunakan untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan pribadi dalam rangka pemerataan keadilan sosial kepada masyarakat.

Sedangkan perbedaan antara kedua sistem tersebut antara lain bahwa pajak mengalami perkembangan yang signifikan baik dalam hal jenisnya maupun besarnya ketentuan pajak yang dikeluarkan dari harta kekayaan. Yang menurut Nuruddin Mhd. Ali hal ini berbeda dengan zakat yang tidak mengalami perubahan yang berarti untuk meningkatkan pendapatan Negara di sektor zakat, bahkan zakat dianggap akan mengurangi pendapatan Negara dari sektor pajak penghasilan.

Demikian pula pajak pada masa sekarang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek pajak karena diakui dalam hukum positif Negara. Bagi para pelanggar pajak jelas konsekuensi hukumnya, sementara bagi pelanggar zakat tidak ada ketentuan hukum positif dan menjadi tanggung jawab setiap individu Muslim dengan Tuhannya.

Ketentuan pajak telah dirasionalisasikan dengan nalar, sehingga masyarakat Barat dapat dengan rela membayarkan pajak meskipun dengan angka yang tinggi. Sementara umat Islam untuk membayar zakat yang 2,5% masih keberatan, karena tidak didukung oleh rasionalitas perhitungan ilmu ekonomi makro karena mengandung nilai *ubudiyyah* kepada Tuhan, disamping mencerminkan lemahnya iman sebagian umat Islam juga mencerminkan lemahnya ekonomi umat Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, zakat dan pajak menjadi dua kewajiban yang dipikul oleh umat Islam. Menghadapi persoalan ini, setidaknya ada tiga pendapat yang mengemuka; *Pertama*, zakat dan pajak sama-sama dibayarkan oleh setiap wajib pajak dan zakat. *Kedua*, seorang Muslim memilih salah satu diantara kedua instrumen tersebut. *Ketiga*, memilih salah satu dan menganggap apa yang dipilihnya itu sudah mewakili keduanya. Jika ia membayar pajak, maka ia menganggap pajak tersebut sebagai zakat dari hartanya (Ali: 21).

Demikian dualitas zakat dan pajak terus didiskusikan dan dikaji, semoga kajian-kajian selanjutnya mengantarkan pada solusi terbaik yang mencerahkan.

I. Kesimpulan

Zakat sebagai instrument ekonommi dan kesejahteraan ummat, maka upaya mengoptimalkan pengelolaannya menjadi suatu keharusan karena merupakan salah satu pilar Islam yang berdimensi *ubudiyyah*, *ijtimaiyyah* dan *iqtishadiyyah*, yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

merupakan penjalin-tali kasih antara manusia (*hablunminannas*) begitu pula penghubung-komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya (*hablunminallah*).

Problematika pengelolaan zakat diantaranya; keterbatasan skill dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam pengelolaan zakat dan masih lemahnya peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan pengoptimalan pengelolaan zakat. Sebagai solusi atas problematika tersebut adalah mensegerakan solusi-solusi terhadap problem-problem yang terjadi pada organisasi pengelola zakat (OPZ), keterlibatan stakeholder (pemerintah) dalam mengatur mekanisme pengelolaan zakat dan menggalakkan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban dan potensi zakat sebagai instrumen ekonomi dan kesejahteraan.

Kedudukan zakat profesi dalam Islam mempunyai posisi yang sama dengan zakat pendapatan lainnya. Sehingga istilah yang lebih tepat terhadap zakat profesi adalah *zakat pendapatan* (*kasab*). Sedangkan kedudukan antara zakat dan pajak, terdapat 3 (tiga) pendapat: *Pertama*, zakat dan pajak sama-sama dibayarkan oleh setiap wajib pajak dan zakat. *Kedua*, seorang Muslim memilih salah satu diantara kedua instrumen tersebut, yaitu: membayar zakat saja atau sebaliknya cukup membayar pajak. *Ketiga*, memilih salah satu dan menganggap apa yang dipilihnya itu sudah mewakili keduanya. Jika ia membayar pajak, maka ia menganggap pajak tersebut sebagai zakat dari hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman Aly, Muchib. 1435 H. *Panduan Peraktis Zakat Empat Madzhab*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang.
- . 1976. *Pedoman Zakat*. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang.
- Bukhari. Tt. *Shahih al-Bukhari*. Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyyah.
- Budi Utomo, Setiawan. 2009. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat; Model Dinamis berdasarkan Standar Nilai Emas dan KHL Provinsi*. Bandung: Mizania.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung.
- Hafiduddin, Didin. 2004. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press.
- Huda, Nurul dkk. 2015. *Zakat perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*. Cet. I: Jakarta: Kencana.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2010. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Edisi Baru, Cet. I; Bandung: Mizan.
- Mhd. Ali, Nuruddin. 2006. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Rajawali.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP. Al-Munawwir.
- Qadir, Abdurrahman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Cet II; Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husim. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2005. *Dawr al-Zakah fi Ilaj al-Musykilat al Iqtishdiyyah*, diterjemahkan oleh Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*. Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim.
- _____. 2007. *Fiqh al-Zakah*. diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafizhuddin dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*. Cet. X; Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1983. *al-Wahy al-Muhammadi*, diterjemahkan oleh Josef C. D. Wahyu Ilahi Kepada Muhammad. Cet. I; Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Sabiq, Sayyid. 2000. *Fiqh al-Sunnah*. dialihbahasakan oleh Mahyuddin Syaf. *Fikih Sunnah*. Jilid III, Cet. XX; Bandung: Al-Ma'arif.
- Safwan, Idris 1997. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat - Pendekatan Transformatif*. Cet. I; Jakarta: Citra Putra Bangsa.
- Setiawan Budi Utomo. 2009. *Metode Praktis Penetapan Nisab - Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Propinsi*, Cet. I; Bandung : Mizania.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1996. *The Economic Enterprise*, diterjemahkan oleh Anas Sidik, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara.
- Stork, Mokhtar dan Muhammad Iqbal. 2002. *Buku Pintar Al-Qur'an-Referensi Lengkap untuk Memahami Kitab Suci Al-Qur'an*. Edisi I; Jakarta: Ladang Pustaka dan Intermedia.
- Tim Penyusun. 2001. *Ensiklopedi Islam*. Jilid V. Cet. IX; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ulwan, Nashih, Abdullah. 1988. *Ahkam al-Zakah ala Daw'i al-Madzahib al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar, dengan judul, *Hukum Zakat*, Cet. I; Bandung: Gema Risalah Press.
- Umratul, Khasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern - Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Cet. I; Malang- awa Timur: UIN-MALIKI PRESS.